

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dirancang guna menjalankan fungsinya sebagai mekanisme kontrol dan pemantauan yang saling terkait terhadap aktivitas di industri jasa keuangan. OJK bersifat independen serta menjadi regulator, monitor, inspeksi, serta penyidikan. Sebagaimana fungsi regulator, OJK bertanggung jawab untuk menetapkan aturan, memberi izin operasional dan sanksi kepada perusahaan jasa keuangan jika melanggar. Di samping itu, OJK bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional guna memastikan sistem keuangan Indonesia telah memenuhi standar global. Hal ini berhubungan dengan regulasi laporan keuangan serta menjaga stabilitas ekonomi domestik dan menarik investasi asing. Tidak hanya itu, OJK sebagai pengawas juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen melalui layanan pengaduan dan mediasi.

2.2. PT Bank Aceh Syariah

Bank ini pada awalnya berdiri dengan nama PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV pada 1957. Kemudian, status bank berubah menjadi BPD Istimewa Aceh. Pada tahun 1999 bank ini baru berbentuk Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukumnya karena dilatarbelakangi oleh keikutsertaan dalam program rekapitalisasi (penambahan modal).

Adapun, operasional bank secara syariah dimulai pada 2004 atas persetujuan Bank Indonesia dengan nama PT Bank Aceh. Tahun 2015 menjadi

tonggak baru dalam perjalanan Bank Aceh, di mana diputuskan bahwa Bank Aceh akan bertransformasi sepenuhnya ke sistem syariah. Proses konversi pun dimulai dengan pembentukan tim khusus yang bekerja di bawah pengawasan OJK. Setelah melalui berbagai tahap dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, izin operasional konversi akhirnya diterbitkan oleh Dewan Komisiner OJK Pusat. Nama Bank Aceh Syariah (BAS) ditetapkan pada 2016.

2.3. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah

BRK Syariah secara resmi bertransformasi menjadi bank syariah pada tahun 2022, menjadikannya BPD syariah kedua di Indonesia yang berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan berbasis kaidah syariah kepada nasabah di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Target BRK Syariah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui jasa keuangan yang inovatif dan berkaidah Islam. Selama operasinya, bank tetap menekankan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM, sambil mendukung perkembangan sektor unggulan di wilayah tersebut, seperti kelapa sawit, perikanan, dan pariwisata. Semua produk dan layanan BRK Syariah bebas dari riba, gharar, dan maysir berkat pendekatan syariah.

BRK Syariah berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi Riau dan Kepulauan Riau dengan mengedepankan kaidah syariah yang universal dan inklusif. Oleh karena itu, BRK Syariah berharap dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.

2.4. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah

Bank ini pada mulanya berbentuk Perseroan Terbatas pada tahun 1999 dengan bentuk BPD konvensional. Selanjutnya, di tahun 2018, bank ini secara sah beroperasi sesuai kaidah syariah menjadi BUS di wilayah Mataram dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (BNTB Syariah).

BNTB Syariah dikembangkan agar fokusnya mengejar citra terpercaya, unggul, serta diminati oleh nasabah. Berdasarkan fokus tersebut, BNTB Syariah berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan berbasis syariah yang mendukung kebutuhan masyarakat, sekaligus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

2.5. PT Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi penggagas yang menerapkan kaidah syariah perbankan di Indonesia. Bank ini awalnya berdiri atas gagasan dari para ulama, intelektual negara, serta para pengusaha yang selanjutnya disokong pemerintahan dan mulai beroperasi tahun 1992.

Berdasarkan visi misinya, BMI seterusnya berinovasi dalam menghadirkan *service* terbaru. Satu di antaranya ialah dengan peluncuran Shar-e, yakni program kartu debit untuk dapat bertransaksi hingga ke Arab Saudi. Selain itu, BMI juga melakukan rebranding logo untuk memperkuat citra sebagai bank syariah yang terkini, cakap, dan futuristik.

2.6. PT Bank Victoria Syariah

Nama PT Bank Victoria Syariah (BVS) secara legal ditetapkan tanggal 6 Agustus 2009. Setahun kemudian, BVS beroperasi secara syariah. BVS terus berkembang berkat sokongan besar dari induk perusahaannya, PT Bank Victoria International Tbk. Atas dasar komitmen yang kuat, perusahaan berupaya membangun kepercayaan pelanggan melalui layanan dan produk yang berlandaskan kaidah syariah, sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal.

BVS dalam mencapai visinya berusaha menjadi bank syariah yang sehat, terpercaya, dan inovatif dalam menyediakan solusi keuangan berbasis syariah untuk masyarakat luas. Oleh karena itu, bank ini menjalankan misi utama seperti menyediakan barang dan jasa yang kompetitif, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia melalui pembiayaan yang berkelanjutan dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

2.7. PT Bank Jabar Banten Syariah

PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada awalnya digagas dari pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan penduduk Jawa Barat akan pelayanan bank berbasis syariah. Oleh karena itu, unit tersebut didirikan pada tanggal 20 Mei 2000. UUS tersebut mempertahankan operasionalnya selama 10 tahun hingga kemudian secara resmi melakukan perubahan UUS ke BUS dalam RUPS. Perubahan tersebut dilandasi untuk membantu program Bank Indonesia

dalam mempercepat pertumbuhan usaha syariah sekaligus meningkatkan *share* perbankan syariah.

Bank BJBS bertujuan untuk menjadi bank syariah yang menjadi pilihan utama untuk kemaslahatan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui layanan keuangan yang profesional, inovatif, dan sesuai syariah. Bank BJBS dalam mencapai tujuannya menetapkan misi untuk memberikan layanan yang berfokus pada kepuasan pelanggan, mendukung UMKM, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan inklusi sosial. Selain itu, bank ini juga menawarkan layanan digital untuk membuat transaksi lebih mudah bagi pelanggan.

2.8. PT Bank Mega Syariah

Berdiri dengan nama PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) tahun 1990 dan bersifat non syariah, pada akhirnya terjadi aksi akuisisi yang mengubah sistem menjadi aktivitas syariah sehingga pada 2010, bank secara resmi menggunakan nama PT Bank Mega Syariah (BMS). BMS bertransformasi sebagai bank devisa pada tahun 2008. Hal itu membantu keterlibatan bank dalam perdagangan internasional. Berkat adanya posisi tersebut telah memperluas cakupan bisnis bank untuk mencakup baik wilayah domestik maupun internasional. Tidak hanya itu, bank ini juga telah mendapat izin dari Kementerian Agama RI untuk mengelola dana haji sebagai BPS BPIH dan mitra Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Peran ini membuat BMS dapat lebih maksimal melayani kebutuhan perbankan syariah masyarakat.

2.9. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Melalui sejarah perubahan nama sebanyak 5 kali, bank ini telah bertransformasi secara resmi menjadi bank umum yang didasari kaidah syariah pada 2009. Selama masa perjalanannya, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) berhasil mencatatkan diri sebagai bank devisa dimulai tahun 1972, sekaligus menjadi bank pertama yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014, bahkan di saat gejolak moneter 1998 termasuk peringkat “A”, berarti tidak membutuhkan restrukturisasi modal dari pemerintah.

2.10. PT Bank KB Bukopin Syariah

Bank KB Bukopin Syariah (BBS) berasal dari akuisisi PT Bank Bukopin Tbk pada jangka waktu antara 2005 sampai 2008. Sebelum bertransformasi akibat akuisisi, bank ini bersifat konvensional. Selanjutnya, pada 2021 disetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah (BBS). Visi BBS adalah menjadi BUS pilihan utama di Indonesia yang tumbuh dan kuat. Demi mencapai visi tersebut, BBS menjalankan misi untuk menyajikan produk maupun layanan keuangan berkaidah syariah, mendukung penguatan ekonomi umat, juga memberikan nilai lebih pada seluruh pengambil keputusan.

2.11. PT Bank Central Asia Syariah

Lahirnya PT Bank Central Asia Syariah (BCAS) dimulai dari terjadinya akuisisi pada tahun 2010. Atas dasar izin dari Gubernur Bank Indonesia, BCAS mulai beroperasi sebagai BUS pada tahun 2010. BCAS menargetkan diri sebagai penguasa industri perbankan syariah, memimpin dalam bidangnya. Komitmen BCA

selaku induk serta pengendali saham utama BCAS terlihat pada ragam jasa yang dapat dinikmati oleh nasabah, seperti setoran, penarikan uang tunai, dan pemakaian debit di semua mesin ATM kepemilikan BCA yang bebas admin tambahan.

2.12. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPS) berdiri akibat terjadinya *spin off* UUS induk perusahaannya tahun 2014. BTPS mempunyai fokus yang unik di industri perbankan syariah, yakni melayani masyarakat prasejahtera produktif, khususnya perempuan, melalui pemberdayaan dan solusi keuangan berbasis syariah. Bank ini dikenal sebagai bank syariah pertama yang memberikan *concern* kepada pemberdayaan masyarakat prasejahtera. Berdasarkan fokus atau visi sedemikian rupa, BTPS memiliki produk dan layanan seperti pembiayaan mikro untuk bisnis kecil dan mikro, serta layanan tabungan dan investasi berbasis syariah. Di samping membantu modal usaha, BTPS turut memberikan pendampingan dan pelatihan, serta pembiayaan tanpa agunan, yang memungkinkan nasabah untuk mengelola bisnisnya dengan lebih baik.